



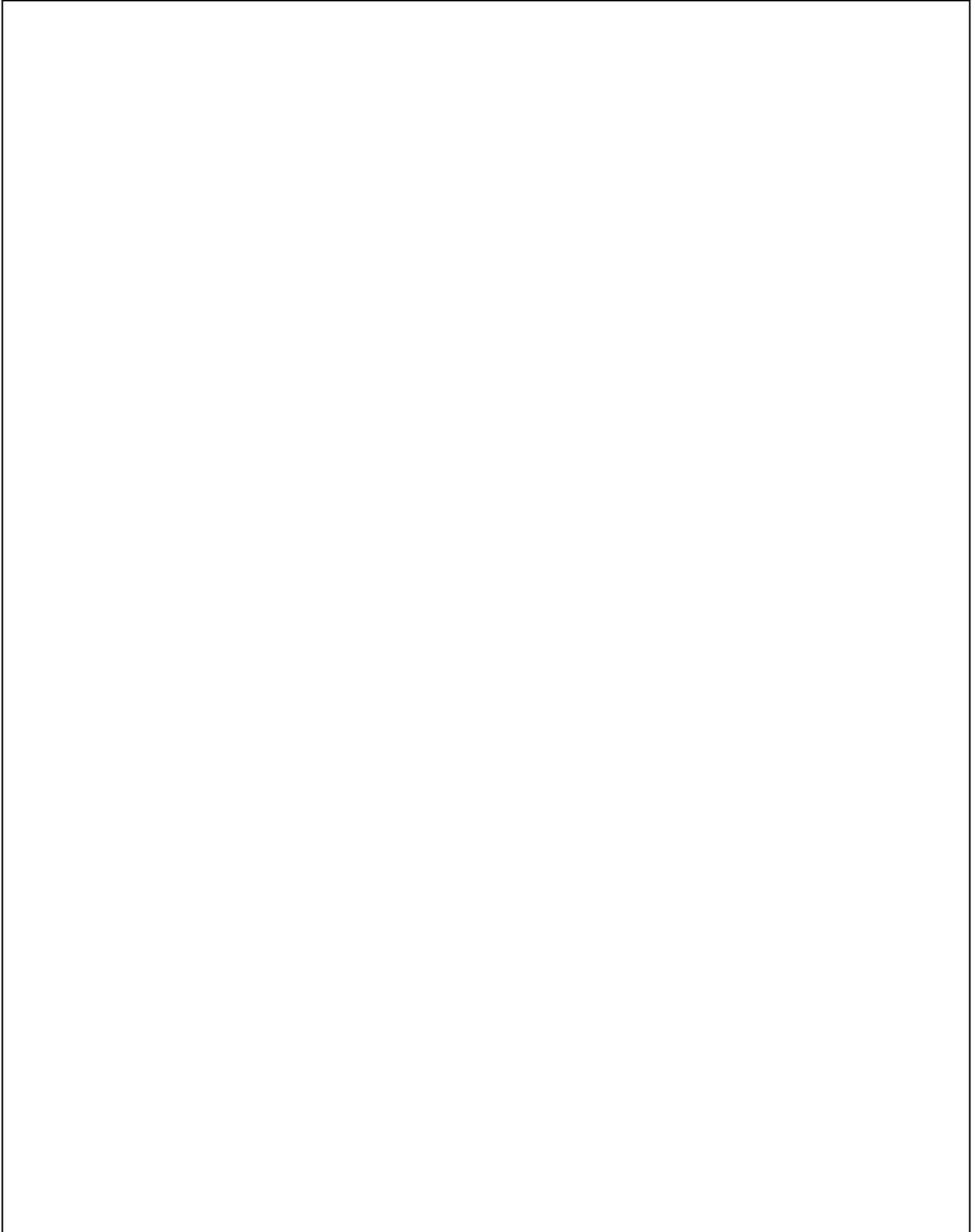
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kompas

Hari: Rabu

Tanggal: 17 September 2008

Halaman: D



tata krama, kebiasaan tegur sapa, dan kultur sosial lainnya akibat kuatnya pengaruh yang dibawa warga pendatang.

Bila diamati, di Seturan kini telah terjadi pertemuan budaya yang sukar dikompromikan. Seturan kini sudah banyak diwarnai aktivitas mahasiswa yang tidak berkontribusi terhadap terjaganya kultur sosial masyarakat setempat, bahkan akan mengalahkan dan mempersempit aktivitas masyarakat Seturan itu sendiri. Hal ini karena mahasiswa bersifat *nothing to lose* sehingga tidak mungkin membangun kerja sama untuk mempertahankan dan melestarikan budaya.

Semakin lumpuh

Selain mahasiswa, pertemuan kultur dan tradisi yang berbeda juga dibawa oleh para pekerja dan pebisnis. Dari sini, kemudian, Yogyakarta memungkinkan untuk menjadi kota "angkuh", seperti halnya Kota Jakarta yang mendapat sungungan banyak orang, "ibu kota lebih kejam dari ibu tiri". Itu artinya, kegelisahan wali kota memiliki landasan moral sosial ketimuran yang konon masyarakat sangat ramah.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwi-payana, dalam kesempatan diskusi yang diadakan lembaga multikulturalisme Impulse beberapa waktu lalu, selama ini di Yogyakarta sebenarnya sudah memiliki banyak ruang publik, namun ruang publik itu tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ari mencontohkan, seniman hanya berkumpul dengan seniman, mahasiswa hanya berkumpul dengan mahasiswa, bertemu dalam ruang publik masing-masing. Jika persinggungan banyak kultur, etnis, agama di Yogyakarta tidak mendapat perhatian, meniscayakan akan terciptanya Kota Yogyakarta yang "angkuh".

Selain itu, hal tersebut akan rentan terjadinya kecemburuan

sosial. Apalagi, menurut Herry Zudianto dalam bukunya yang berjudul *Kekuasaan sebagai Waka Politik, Manajemen Yogyakarta Kota*, ketahanan Kota Yogyakarta dalam menjaga pluralisme sosial selama ini lebih dikarenakan kemampuan masyarakat dominan (warga Yogyakarta) menerima perbedaan budaya dan etnis yang datang. Jika nantinya masyarakat Yogyakarta semakin kehilangan lahan dan ruang publik, ketika disandingkan dengan semakin meningkatnya jumlah urban dari daerah akan terus memperburuk kultur sosial masyarakat Kota Yogyakarta sendiri.

Terbukti meledaknya peristiwa Sampit, Kalimantan, berdarah tahun 1999 bisa dijadikan cerminan awal bahwa ketika masyarakat Yogyakarta nantinya kehilangan lahan dan sumber perekonomiannya menurun karena tidak mampu bersaing dengan para urban, kemungkinan besar solidaritas masyarakat akan semakin lumpuh dan cenderung mengundang kecemburuan sosial akut yang membibiti konflik fisik di berbagai tempat.

Inisiatif pemerintah kota untuk menciptakan ruang publik merupakan solusi tepat untuk mempertahankan nilai-nilai kultur Yogyakarta serta untuk menjaga pluralisme dan harmoni sosial. Di negara-negara tetangga, ruang publik benar-benar dipandang penting. Di China nyaris di setiap depan rumah susun di sana memiliki taman rindang dan cukup luas. Taman itu setiap pagi dan malam dipenuhi komunitas lansia yang aktif berolahraga ringan semacam tai chi, senam, catur, mahyong atau sekadar bermain alat musik tradisional. Akhir kata, semoga apa yang diagendakan pemerintah kota benar-benar menjadi kenyataan.

FATHOR RAHMAN MD
Peneliti Institute for Humankind and Political Studies (Inhups) Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005